

ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL REGIONAL PROVINSI RIAU

TRIWULAN II

I. PENGANTAR

Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan II ini adalah merupakan ringkasan eksekutif dari Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dihasilkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang merupakan penyajian data ekonomi daerah dan kondisi fiskal pemerintah di wilayah Provinsi Riau, termasuk APBD Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

II. PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Riau adalah daerah yang relatif lebih maju dibanding daerah lainnya di Sumatera. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau berada di atas rata-rata nasional pada tahun 2011, yaitu sebesar 76,53 dan menduduki peringkat ke-2 nasional, setelah Sulawesi Utara yang mencapai 76,54. Rata-rata IPM Nasional tahun 2011 adalah sebesar 72,77. IPM Riau menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian juga jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau pada September 2012 diperkirakan sebesar 481,30 ribu jiwa atau 8,05 persen yang berarti jauh dibawah rata-rata nasional. Dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 482,05 ribu jiwa (8,47 persen), jumlah penduduk miskin di Riau sedikit turun yaitu sekitar 0,75 ribu jiwa. Kemiskinan di Riau masih didominasi warga yang tinggal di wilayah pedesaan. Selama periode 2011- September 2012, penduduk miskin di daerah perdesaan diperkirakan berkurang 15,23 ribu jiwa, sementara di daerah perkotaan diperkirakan bertambah 14,48 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk di Riau juga sangat tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk nasional, Berdasarkan Proyeksi SUPAS dan estimasi Pusdatin Kemenkes (2012), penduduk Provinsi Riau tahun 2006 berjumlah

4.762.653 jiwa, tahun 2007 naik 9,8% menjadi 5.070.952 jiwa, tahun 2008 naik 2,33% menjadi 5.189.154, tahun 2009 berjumlah 5.306.532 jiwa, hasil sensus tahun 2010 penduduk Riau meningkat menjadi 5.538.366 jiwa, tahun 2011 sebesar 5.733.721 jiwa, dan tahun 2012 meningkat menjadi 5.935.430 jiwa.

Kondisi perekonomian Provinsi Riau secara keseluruhan dengan memperhitungkan unsur minyak dan gas (migas), perekonomian Riau pada triwulan I-2013 menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas dapat mencapai 7,55%, tetapi pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan unsur migas jauh lebih kecil yaitu sebesar 1,21% (yoy). Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan disebabkan melambatnya pertumbuhan sektor pertambangan migas yang memberikan kontribusi terbesar perekonomian Riau.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas Riau berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh relatif kuatnya permintaan domestik khususnya konsumsi, membaiknya kinerja sektor industri pengolahan non-migas, dan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dalam rangka implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sementara itu inflasi pada triwulan I tahun 2013 di Provinsi Riau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. yaitu dari 0,68% menjadi 2,45%. Angka tersebut juga tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi Sumatera (2,35%) dan inflasi Nasional (2,43%) pada triwulan yang sama.

Tingkat pengangguran terbesar terjadi di Kota Pekanbaru, yaitu sebesar 9,33%, sedangkan persentase terkecil terdapat di Kabupaten Pelalawan sebesar 2,93%. Persentase penduduk bekerja tertinggi terdapat di Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 66,14, dan terkecil di Kota Pekanbaru, sebesar 58,18%. Hal tersebut terjadi, mengingat Kota Pekanbaru sebagai kota besar (metropolitan) mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

III. PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL

Pendapatan Pusat

Berbeda dengan tingkat nasional, *I-account* tingkat Provinsi Riau tahun 2013, diperkirakan akan mengalami surplus 2 kali lipat lebih dari jumlah belanja negara. Hal tersebut dapat dilihat dari selisih antara estimasi pendapatan dengan pagu belanja negara. Sedangkan untuk realisasinya, sampai dengan triwulan I telah menunjukkan surplus hampir mendekati 3 triliun rupiah (Rp2.961.641.023.792). Demikian pula untuk realisasi triwulan II telah menunjukkan surplus mendekati 6 triliun rupiah (Rp5.733.076.788.575).

Selama tahun 2013, estimasi maupun realisasi penerimaan dalam negeri didominasi oleh penerimaan perpajakan. Sampai dengan triwulan II (semester I) tahun 2013 penerimaan perpajakan menyumbang 97% dari total pendapatan, dan sisanya disumbang oleh PNBPN. Selanjutnya, realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) dengan 41%, pajak pertambahan nilai (PPN) dengan 35% dan bea keluar dengan 20% dari total penerimaan perpajakan.

Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah melampaui target yang ditentukan pada triwulan I, Target PPh dan PPN di triwulan I 2013 telah terlampaui masing-masing sebanyak 50% dan 30% dari estimasi. Estimasi PPh maupun PPN sampai dengan triwulan II tahun 2013 telah ditingkatkan menjadi masing-masing sebesar 92% dan 74% dari estimasi di triwulan I. Walaupun estimasi telah ditingkatkan realisasi PPN dan PPh pada triwulan II telah melampaui estimasi masing-masing yaitu sebesar 80% dan 54%.

Namun, hal sebaliknya terjadi pada realisasi bea keluar, yang sampai dengan semester I baru mencapai 14% dari estimasi. Estimasi awal bea keluar yang relatif tinggi disebabkan karena penetapan estimasi hanya berdasarkan nilai rupiah realisasi bea keluar tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan faktor fluktuasi harga komoditi ekspor utama Provinsi Riau yaitu *Crude Palm Oil*

(CPO). Penurunan tajam harga komoditi CPO sejak akhir tahun 2012 sangat mempengaruhi pendapatan negara dari bea keluar. Meskipun secara volume, ekspor CPO sama dengan tahun sebelumnya, namun penurunan harga CPO di pasar internasional menyebabkan nilai ekspor menjadi turun dan berimplikasi terhadap turunnya perolehan bea keluar.

Belanja Pusat

Secara umum, tingkat realisasi belanja pemerintah pusat untuk triwulan I tahun 2013, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2012. Berdasarkan hasil pengolahan data pagu dan belanja pemerintah pusat tahun 2012, tingkat realisasi belanja pemerintah pusat triwulan I tahun 2012 adalah sebesar 9,29% sedangkan tingkat realisasi belanja pemerintah pusat untuk triwulan I tahun 2013 adalah sebesar 10,05%.

Selanjutnya, sampai dengan triwulan II tahun 2013, realisasi belanja pemerintah pusat adalah sebesar 29,65% yang hampir menyamai tingkat penyerapan di triwulan II tahun 2012 yang mencapai 29,91%. Namun demikian, tingkat penyerapan ini masih dibawah rata-rata tingkat penyerapan nasional yang sebesar 35,2%. Mahkamah Agung, merupakan bagian anggaran (BA) dengan tingkat penyerapan tertinggi, yaitu mencapai 74% dari jumlah pagu DIPA-nya. Selanjutnya Badan Pusat Statistik mempunyai tingkat penyerapan tertinggi kedua dengan 57% dari pagu DIPAny. Selain itu terdapat 3 BA dengan tingkat penyerapan sedikit diatas 50% dari masing-masing pagu DIPA yaitu, Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan 51%, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dengan 54% dan Arsip Nasional RI dengan 51%.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki pagu terbesar, sangat menentukan tingkat penyerapan secara keseluruhan, dimana tingkat penyerapan Kemen PU yang sebesar 29% dari total pagu DIPAny hampir sama dengan tingkat penyerapan secara keseluruhan, yaitu 29,65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat di Provinsi Riau pada tahun 2013 sangat tergantung dari tingkat penyerapan anggaran Kementerian PU.

Sementara itu untuk dana dekonsentrasi dengan pagu 2013 sebesar Rp182.975.227.000,- dan sampai dengan semester I 2013 baru direalisasikan sebesar Rp33.363.603.660,- atau sebesar 18%. Tingkat realisasi pada tahun 2013 lebih baik apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Untuk dana Tugas Pembantuan (TP) dengan pagu dana sebesar Rp355.912.979.000, sampai dengan semester I 2013 terealisasi sebesar Rp59.929.858.743,- atau sebesar kurang lebih 15%. Dana Urusan Bersama (DUB) dengan pagu dana sebesar Rp93.220.483.000,- untuk tahun 2013, sampai dengan triwulan I 2013 terealisasi cukup baik yaitu sebesar Rp46.090.828.600,- atau sebesar 49%.

Profil APBD Provinsi/Kabupaten/Kota

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD cukup menentukan dalam pencapaian target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari postur APBD Riau dapat diketahui bahwa meskipun menganut anggaran defisit, namun dibiayai dengan SILPA, sehingga tidak terkategori kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Besarnya SILPA mengindikasikan belanja yang kurang efektif realisasinya.

APBD Propinsi Tahun 2013 di sisi belanja naik sekitar 24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat komitmen untuk meningkatkan belanja modal di tahun 2013, demikian juga alokasi untuk infrastruktur yang hampir sebesar 25% dan untuk alokasi pendidikan sebesar 21%.

Realisasi pendapatan hingga semester I 2013 telah mencapai 43%. Namun disisi lain, kinerja realisasi APBD sampai semester I tahun 2013 masih sangat rendah. Belanja Pemerintah Propinsi sampai semester I baru terealisasi sebesar 19 %.

IV. REKOMENDASI

Dari analisis di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Penerimaan pajak perlu dioptimalkan mengingat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan cenderung terus menurun. Potensi penerimaan pajak terlihat dari masih rendahnya tax ratio, sehingga perlu memformulasi langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pendapatan pajak.
2. Perlu upaya yang serius untuk mempercepat realisasi anggaran, baik belanja Pemerintah dan maupun belanja Pemerintah Provinsi Riau yang masih sangat rendah pada semester I 2013 ini. Berbagai regulasi yang menghambat upaya percepatan pelaksanaan anggaran perlu direvisi.

ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL REGIONAL PROVINSI RIAU

TRIWULAN III

PENDAHULUAN

Berbeda dari laporan triwulan II yang merupakan ringkasan eksekutif dari Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dihasilkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tulisan singkat ini, Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan III ini merupakan rangkuman dari analisis data fiskal dan pengamatan penulis, Kajian Ekonomi Regional yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, serta dari berbagai sumber/media *online*.

Khusus untuk analisis perkembangan fiskal, data yang penulis terima dari Kanwil DJPB Riau adalah data realisasi APBD Propinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota dan 10 Kabupaten yaitu :

- a. Kota Pekanbaru
- b. Kabupaten Kampar
- c. Kabupaten Pelalawan
- d. Kabupaten Rokan Hulu
- e. Kabupaten Siak
- f. Kota Dumai
- g. Kabupaten Bengkalis
- h. Kabupaten Rokan Hilir
- i. Kabupaten Meranti
- j. Kabupaten Indragiri Hulu
- k. Kabupaten Indragiri Hilir
- l. Kabupaten Kuantan Singingi

II. PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI RIAU

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Riau termasuk migas pada triwulan III tahun 2013, yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, mengalami pertumbuhan sebesar 2,67 persen. Angka ini relatif lebih baik dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (triwulan III tahun 2012) yang hanya tumbuh 2,35 persen (*y-on-y*). Sementara itu, Ekonomi Riau tanpa migas triwulan III tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (*y-to-y*)

Pertumbuhan ekonomi Riau termasuk migas (*y-on-y*) pada triwulan III 2013 hampir terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor Industri Pengolahan sebesar 6,6 persen dan terendah di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar -0,41 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas (*y-on-y*) pada triwulan III 2013 juga hampir terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor Industri Pengolahan sebesar 7,87 persen dan terendah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 0,41 persen.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau pada Triwulan III 2013 terlihat membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini didukung oleh perbaikan nilai ekspor Riau. Pada bulan September 2013 mengalami kenaikan sebesar 16,17 persen dibanding ekspor bulan Agustus 2013. Meskipun demikian secara kumulatif, nilai ekspor Januari-September 2013 turun sebesar 12,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2012. Kontribusi nilai ekspor Riau terhadap Nasional bulan September 2013 sebesar 10,13 persen

Inflasi

Bulan Oktober 2013, Kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 144,29. Demikian juga Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 1,17 persen dengan IHK 149,21. Laju inflasi tahun kalender di Pekanbaru 7,94 persen dan Dumai 7,90 persen, sedangkan inflasi “year on year” Kota Pekanbaru 8,33 persen dan Dumai 9,01 persen.

Inflasi umum bulanan baik Kota Pekanbaru dan Dumai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan September 2013 mempunyai trend perubahan yang hampir sama dengan inflasi nasional kecuali bulan Oktober 2013 untuk Kota Dumai dan bulan April 2013 pada inflasi nasional. Tingkat Inflasi secara nasional yang cukup tinggi pada Juli 2013 juga terjadi di Pekanbaru dan Dumai, walaupun kenaikan inflasi kedua kota tersebut tidak setajam kenaikan inflasi nasional, demikian juga dengan inflasi September 2013, walaupun terjadi penurunan inflasi dibanding bulan Agustus 2013, Kota Pekanbaru dan Dumai mengalami inflasi dan Nasional justru deflasi.

Kemiskinan

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Riau memperlihatkan kecenderungan menurun pada periode 2008-2013. Secara relatif terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 10,63 persen pada tahun 2008 menjadi 7,72 persen pada bulan Maret 2013. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret 2013 menurun dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2012 (8,22 persen). Penurunan ini sudah memperhitungkan kenaikan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 8,37 persen dari Rp300.791,- per kapita per bulan pada Maret 2012 menjadi Rp325.978,- per kapita per bulan pada Maret 2013.

III. PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL

APBD Propinsi

Pendapatan daerah Propinsi hingga triwulan ke III telah terealisasi sebesar 63,4%, meningkat dari 43% pada triwulan II. Realisasi yang terbesar justru untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah mencapai 73,5%.

Di sisi belanja, realisasi juga meningkat menjadi 40% di Triwulan III, atau meningkat sebesar 21% dalam satu triwulan (dimana pada triwulan II realisasi

baru mencapai 19%). Namun secara umum realisasi ini jauh sangat rendah dari target belanja tahun 2013.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang menyampaikan bahwa realisasi belanja APBD 2013 Provinsi Riau hingga Oktober masih rendah yakni 49 persen. Pemprov berkilah rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan mekanisme pencairan anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Riau yang tidak serta merta bisa mengambil dana di keuangan dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pencairan dana melalui SP2D tidak dapat langsung dijadikan landasan sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran dan untuk mempersiapkan SPJ memerlukan waktu (Riau Pos 4/12/2013).

Jadi salah satu penyebab lambatnya realisasi anggaran adalah karena proses pencairan dana yang terhalang oleh pelaporan SPJ. Lambatnya realisasi anggaran diklaim bukan karena tidak berjalannya SKPD, melainkan karena persoalan SPJ. Pemerintah Propinsi Riau tetap optimis bahwa untuk tahun 2013 ini, realisasi APBD Riau diperkirakan sekitar 90 persen.

APBD Kabupaten/Kota di Riau

Realisasi belanja Kabupaten/Kota se Propinsi Riau sampai Triwulan ke III secara rata-rata tidak berbeda dengan realisasi belanja Pemerintah Propinsi. Terdapat Kabupaten yang realisasinya yang sangat memprihatinkan, yaitu baru 30%, namun juga ada yang realisasinya sudah mencapai 60%.

Sementara itu, realisasi pendapatan jauh melebihi target pendapatan. Di beberapa kabupaten/Kota, realisasi pendapatan bahkan sudah mencapai 90%.

Realisasi belanja yang rendah di satu sisi dan realisasi pendapatan yang tinggi di sisi lain tentunya menjadi persoalan tersendiri yang harus dicarikan solusinya. Pendapatan yang menumpuk di kas daerah tentu akan jadi beban

bagi perbankan daerah yang mau tidak mau akan meng-konversi kas tersebut ke surat berharga jangka pendek seperti SBI dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan money supply.

Sejauh mana dampak dari kondisi ini terhadap perekonomian daerah dan nasional, perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Namun yang jelas rendahnya realisasi belanja memperlihatkan kekurangmampuan Pemda untuk memfasilitasi pembangunan.

IV. REKOMENDASI

Dari analisis di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau pada Triwulan III 2013 sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini didukung oleh perbaikan nilai ekspor Riau. Pertumbuhan ini diperkirakan akan jauh lebih baik jika didukung dengan perbaikan realisasi belanja pemerintah daerah. Untuk itu perlu dicari solusi yang komprehensif terkait dengan persoalan realisasi belanja daerah yang masih sangat lambat hingga Triwulan III.
2. Gap antara realisasi pendapatan yang tinggi di satu sisi dengan realisasi belanja yang rendah di sisi lain tentu akan menjadi beban perekonomian nasional. Jika kondisi ini terjadi juga di banyak daerah di Indonesia, tentu perlu kajian lebih lanjut terkait dampaknya terhadap perekonomian nasional. Jika kondisi ini merupakan fenomena nasional, maka Pemerintah Pusat sebagai penyalur dana perimbangan, perlu mengkaji alternatif sistem penyaluran dana perimbangan ke depan.